



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Urgensi Pendidikan Pancasila Untuk Mencegah Radikalisme

Muhammad Dimas Arzy¹, Keysha Nabilla Putri Marasabessy², Ghina Salsabila³, Kalisa Attaya⁴, Imasayu Nuralyza⁵, Baiq Dwiyan Nugrahani⁶, Virga Fathiya Dalila⁷

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, dimsss.arzy@gmail.com.

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, marasabessykeysha@gmail.com.

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, ghinasalsabila112@gmail.com.

⁴Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, kalisattaya202@gmail.com.

⁵Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, masayunuralyza@gmail.com.

⁶Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, nugrahanibaiq@gmail.com.

⁷Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, virgadaila@gmail.com.

Abstrak: Radikalisme merupakan tantangan besar bagi persatuan Indonesia karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pendidikan Pancasila dianggap sebagai elemen kunci dalam menangkal paham radikal, khususnya di kalangan pemuda. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya memperkuat pendidikan Pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisme di dunia pendidikan dan masyarakat. Beberapa manfaat penelitian ini antara lain: meningkatkan kesadaran akan perlunya penguatan ideologi nasional, menjadi pedoman dalam menyusun kurikulum pendidikan berbasis karakter, serta mempromosikan kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk melawan radikalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber akademis terpercaya dari jurnal ilmiah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Temuan penelitian mengungkap bahwa strategi efektif untuk memperkuat ketahanan ideologi pemuda dan mencegah radikalisme meliputi: penanaman nilai Pancasila sejak dini, optimalisasi media digital, penyatuan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, serta pendekatan multikultural dan kerja sama lintas sektor.

Kata Kunci: Ideologi; pancasila; pemuda; pendidikan; radikalisme.

Abstract: Radicalism is a major challenge to Indonesia's unity as it contradicts the principles of Pancasila. Pancasila education is considered a key element in countering radical ideologies, particularly among the youth. This study aims to analyze the importance of strengthening Pancasila education as an effort to prevent radicalism in both educational institutions and society. The benefits of this research include: increasing awareness of the need to reinforce the national ideology, serving as a guide in developing character-based educational curricula, and promoting collaboration among stakeholders to combat radicalism. The research method employed is a literature study by analyzing credible academic sources from scholarly journals published within the last ten years. The findings reveal that effective strategies to strengthen the ideological resilience of youth and prevent radicalism include: instilling Pancasila values from an early age, optimizing digital media, integrating Pancasila values into the curriculum, and applying multicultural approaches and cross-sectoral cooperation.

Keyword : Ideology; pancasila; youth; education; radicalism.

*Correspondence Address:	dimsss.arzy@gmail.com
--------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	31 May 2025	31 May 2025	30 September 2025

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pancasila memiliki peranan dan posisi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Terdapat berbagai makna terkait kedudukan dan fungsi Pancasila yang perlu dipahami sesuai konteksnya masing-masing. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, serta ideologi nasional (Kartika & Mahendra, 2023). Pancasila merupakan ideologi terbuka yang memiliki arti mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, bersifat dinamis, sistem pemikiran yang terbuka, serta lahir dari kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa. Karena itu, Pancasila dijadikan sebagai landasan negara dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, fungsi Pancasila bersifat tetap dan tidak dapat diubah, salah satunya adalah sebagai tameng untuk menangkal paham radikalisme (Satria *et al.*, 2023).

Radikalisme merupakan suatu gerakan sosial yang secara total menolak tatanan sosial yang berlaku, ditandai dengan rasa ketidakpuasan moral yang mendalam terhadap kelompok yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa (Satria *et al.*, 2023). Paham ini muncul sebagai akibat dari pandangan ekstrim yang berkembang karena ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu. Aksi-aksi radikalisme ini bertentangan dengan tiga sila utama dalam Pancasila yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila persatuan Indonesia (Satria *et al.*, 2023). Kondisi ini menuntut bangsa Indonesia untuk semakin meningkatkan kewaspadaan. Paham radikalisme tidak hanya tumbuh di kalangan masyarakat yang kurang terjangkau pendidikan formal, tetapi juga memiliki potensi masuk ke lingkungan sekolah dan kampus.

Penelitian yang dilakukan oleh (Basri & Dwiningrum, 2019) menjelaskan bahwa generasi milenial, terutama mahasiswa merupakan generasi yang rentan terpengaruh oleh paham radikalisme. Penelitian lain menyebutkan bahwa eksposur terhadap pemberitaan radikalisme di media online dapat membentuk pola pikir pelajar yang kesehariannya hidup dengan teknologi (Hidayat & Lubis, 2021). Sikap radikalisme ini bertumbuh subur dan cepat di kalangan generasi muda yang masih menempuh pendidikan baik di sekolah, maupun perguruan tinggi.

Peran ideologi Pancasila dalam menanggulangi dan membatasi penyebaran radikalisme di Indonesia sangat penting untuk membentuk bangsa yang progresif dan mampu menjalankan sistem kenegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai fundamental Pancasila. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini mulai pudar, hal ini disebabkan oleh berbagai peristiwa kekerasan seperti intimidasi terhadap kelompok minoritas, bentrokan antar suku dan ras, ancaman aksi terorisme, serta konflik antar agama (Satria *et al.*, 2023). Untuk mengatasi krisis ideologi ini, penguatan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pendekatan yang kontekstual, humanis, partisipatif, dan dialogis agar nilai-nilai tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda, meresap dalam pikiran dan perilaku mereka, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial terhadap keberagaman sosial (Pardi, 2025).

Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan Pancasila yang dirancang secara sistematis, kontekstual, dan terukur agar mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara efektif kepada generasi muda. Pendidikan yang terukur memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menjadi tameng utama dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas. Berdasarkan permasalahan di atas, melalui kajian pustaka yang berjudul "Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Mencegah Radikalisme" menegaskan bahwa pendidikan Pancasila yang dirancang secara sistematis, kontekstual, dan terukur sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai langkah preventif terhadap berkembangnya paham radikalisme di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas. Harapannya, generasi muda Indonesia mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

METODE | METHOD

Metode yang digunakan oleh penulis adalah kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini (Widiasari *et al.*, 2019). Menurut Cooper; Creswell (2010) dalam Widiasari *et al.*, (2019) urgensi dari kajian pustaka ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan serta untuk menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada. Menurut Gall, (1996) dalam Widiasari *et al.*, (2019) kajian pustaka memiliki peran penting antara lain sebagai sarana untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian, membantu dalam menentukan metode atau prosedur penyelesaiannya, memahami dasar teori yang mendasari masalah tersebut, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya, menghindari terjadinya duplikasi penelitian, dan memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian.

Sumber pustaka primer dalam penulisan review artikel ini berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang diperoleh melalui mesin pencari akademik seperti Google Scholar. Pemilihan jurnal dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian topik serta kualitas publikasi. Artikel yang digunakan dalam kajian ini merupakan publikasi dalam bahasa Indonesia agar lebih relevan dengan konteks dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kriteria jurnal yang digunakan adalah jurnal yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir dan relevan dengan tema pendidikan Pancasila, radikalisme, serta penguatan ideologi negara. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian pustaka antara lain: *Pendidikan pancasila, radikalisme, nilai-nilai kebangsaan, ideologi pancasila, dan pendidikan karakter*, guna memperoleh literatur yang sesuai dan mendukung analisis kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi keutuhan NKRI karena menimbulkan disintegrasi sosial dan bertentangan dengan nilai kebangsaan. Pancasila berperan sebagai filter ideologis yang menanamkan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan menghargai keberagaman (Kurniawati *et al.*, 2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara sistematis, khususnya melalui pendidikan yang mampu membentuk karakter generasi muda agar tidak mudah terpapar pengaruh negatif di media digital (Pakpahan *et al.*, 2021). Selain itu, pendidikan multikultural juga penting dalam menumbuhkan sikap saling menghargai (Deti & Dewi, 2021) dan pencegahan radikalisme memerlukan dukungan dari kurikulum pendidikan, media, serta kolaborasi lintas sektor (Andriani & Nijhica, 2022). Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut terkait aspek strategis dalam implementasi Pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisme.

1. Pancasila sebagai Fondasi Pencegahan Radikalisme

Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar falsafah bangsa Indonesia memiliki fungsi yang sangat vital dalam menangkal radikalisme. Nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip kehidupan yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan toleransi. Di tengah meningkatnya paham radikal, Pancasila hadir sebagai penyeimbang sekaligus penuntun dalam menjaga harmoni dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Radikalisme tumbuh dikarenakan adanya penurunan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga solusi utamanya adalah revitalisasi nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kehidupan warga negara (Kartika *et al.*, 2023).

Pancasila merupakan fondasi ideologi yang kokoh dalam menghadapi radikalisme, yang secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya terkait persatuan bangsa dan penghormatan terhadap keberagaman. Pancasila menekankan pentingnya kebebasan beragama tanpa intimidasi, serta penyelesaian konflik antaragama melalui pendekatan humanistik seperti dialog dan gotong royong. Oleh karena itu,

penguatan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membentengi masyarakat dari pengaruh ideologi ekstrem yang berpotensi merusak integrasi nasional. Keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut menjadi strategi preventif dalam menangkal radikalisme, terutama melalui sektor pendidikan (Kurniawati *et al.*, 2024).

Radikalisme tumbuh dari berbagai akar permasalahan seperti ketimpangan sosial, krisis ekonomi, konflik politik, hingga pemahaman keagamaan yang sempit dan eksklusif. Dalam konteks ini, Pancasila harus ditegakkan sebagai sistem nilai yang mampu menjadi penangkal radikalisme. Pancasila tidak cukup hanya diposisikan sebagai simbol atau slogan, melainkan perlu diinternalisasikan sebagai metode nilai dengan standar moral dan sosial yang diakui oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penerapan metode Pancasila melalui kebijakan dan sistem pendidikan menjadi langkah yang baik dalam membangun ideologi bangsa (Hastangka & Ma'ruf, 2021).

Selain itu, dalam era globalisasi, Pancasila juga berfungsi sebagai filter dan penyeimbang antara keterbukaan terhadap perubahan dari luar dengan tetap menjaga jati diri bangsa. Radikalisme adalah hasil dari ekspresi religius yang tidak seimbang dan tidak berbudaya. Sehingga, penguatan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan untuk mencegah lahirnya sikap radikalisme, terutama di kalangan generasi muda dan lingkungan perguruan tinggi (Andriani & Najicha, 2022).

2. Urgensi Pendidikan Pancasila Sejak Dini

Pendidikan Pancasila harus ditanamkan sejak usia dini melalui kurikulum yang relevan dan pemanfaatan media digital sebagai sarana sosialisasi (Kusuma *et al.*, 2024). Penanaman nilai-nilai Pancasila sejak sekolah dasar merupakan strategi dalam membangun karakter kebangsaan generasi penerus yang kuat. Pendidikan Pancasila pada usia dini menekankan pada pengenalan butir-butir Pancasila serta implementasinya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (Satria *et al.*, 2023), sehingga dapat mendorong tumbuhnya sikap toleransi dan saling menghargai (Pakpahan *et al.*, 2021). Selain itu, pendidikan sejak dini juga menjadi langkah strategis untuk mempertahankan negara dari pengaruh ideologi transnasional yang berpotensi merusak tatanan demokrasi dan keutuhan bangsa (Kurniawati *et al.*, 2024).

Dengan demikian, pendidikan Pancasila sejak dini berperan penting dalam penataan fondasi karakter anak agar di masa depan memiliki ketahanan ideologi, mampu menjaga stabilitas nasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh paham radikalisme (Satria *et al.*, 2023). Beragam metode dapat diterapkan dalam penyampaian materi Pancasila, seperti permainan peran, diskusi kelompok, kunjungan ke tempat ibadah, dan proyek bakti sosial. Pendekatan-pendekatan tersebut berperan dalam menumbuhkan pemahaman nilai-nilai kebhinekaan dan semangat gotong royong. Penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini juga terbukti mampu meningkatkan sikap saling menghargai perbedaan serta menurunkan perilaku diskriminatif, karena anak-anak terbiasa hidup dalam keberagaman, memahami pentingnya persatuan, dan menolak segala bentuk kekerasan maupun paham ekstrem (Auzi *et al.*, 2024).

3. Peran Pendidikan Multikultural dan Media Digital

Di era digitalisasi ini informasi-informasi terkait paham radikalisme sangat banyak tersebar luas sehingga mudah sampai ke sarannya yaitu generasi muda terutama yang masih berusia remaja. Usia remaja waktu dimana seseorang sedang mencari identitas diri dan senang bereksplorasi sehingga sangat rentan terhasut dengan paham-paham ekstrim tersebut. Paham radikalisme ini menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan akan berdampak buruk terhadap kepribadian generasi muda (Satria *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penting diterapkan pendidikan multikultural, dialog antar agama, diskusi mengenai permasalahan

ketimpangan sosial dengan menghadirkan nilai-nilai Pancasila yang relevan didalamnya agar generasi muda memahami dengan baik perbedaan yang ada di lingkungannya terutama mengenai keyakinan dan tidak terpengaruh paham radikalisme (Pardi, 2025). Pendidikan multikultural dapat memberikan dampak positif terhadap terbentuknya sikap yang toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman (Kusuma *et al.*, 2024).

Selain itu, pendidikan Pancasila juga harus dikembangkan dengan pendekatan yang visual, menarik, dan relevan dengan kesehariannya generasi milenial (Pakpahan *et al.*, 2021). Media digital menjadi salah satu sarana pendidikan Pancasila yang efektif. Dalam hal ini, diperlukan kreativitas dan pendekatan emosional dalam penyampaiannya yaitu dengan gaya komunikasi yang luwes dan tidak monoton sehingga menarik perhatian sasaran dan tidak jenuh jika di simak dengan baik. Dengan cara ini, informasi terkait ideologi bangsa dapat diterima dengan baik, pengetahuan dan pemahaman terkait Pancasila meningkat, narasi negatif tentang Pancasila dapat dipatahkan dan tidak mudah terpengaruh oleh radikalisme (Pardi, 2025).

4. Integrasi Pancasila dalam Kurikulum dan Aktivitas Pendidikan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk membentuk karakter dan identitas nasional mahasiswa. Pendidikan Pancasila menjadi pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun perguruan tinggi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat identitas nasional dan membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Dinarti & Dewi, 2022). Nilai-nilai Pancasila diintegrasikan khususnya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Materi dalam PPKn tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menekankan praktik nyata penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi. Kurikulum nasional menekankan pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial melalui berbagai metode pembelajaran dan aktivitas (Purnawanto, 2024).

Kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan menjadi ruang penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan mahasiswa. Melalui keikutsertaan aktif dalam berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM), seperti olahraga, seni, keagamaan, maupun organisasi berbasis keilmuan, mahasiswa tidak hanya mengembangkan minat dan bakat, tetapi juga belajar menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konkret. Misalnya, UKM di Universitas Pancasila menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, memperkuat solidaritas, serta membangun semangat gotong royong dan kebersamaan, yang merupakan pengejawantahan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia (Iqbal *et al.*, 2024).

Selain itu, penguatan nilai Pancasila juga terwujud melalui program pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Kegiatan seperti bakti sosial, pengajaran di desa, atau pembangunan fasilitas umum menjadi sarana aktualisasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengalaman ini membentuk karakter mahasiswa yang peduli, bertanggung jawab, dan memiliki empati tinggi terhadap sesama, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan mereka. Untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila, perguruan tinggi juga dapat menyelenggarakan berbagai workshop, pelatihan, dan simulasi yang berfokus pada pengembangan karakter dan kepemimpinan. Melalui kegiatan seperti diskusi isu-isu kebangsaan, simulasi musyawarah, serta pelatihan kepemimpinan berbasis Pancasila, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, demokratis, serta mampu mengambil keputusan secara adil dan bijaksana. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya

memperkaya wawasan, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam perilaku dan pola pikir mahasiswa, sehingga mereka siap menjadi agen perubahan yang berintegritas di masyarakat (Sari *et al.*, 2023).

5. Peran Pendidikan Tinggi dan Tantangannya

Radikalisme di lingkungan kampus berkembang akibat berbagai faktor, baik ideologis maupun non-ideologis. Mahasiswa yang sedang dalam fase pencarian identitas dan cenderung terbuka terhadap pemikiran baru menjadi target mudah penyebaran paham radikal. Kondisi ekonomi, kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, serta pemahaman agama yang dangkal turut meningkatkan kerentanan mereka. Propaganda radikal bahkan disebarkan secara terselubung melalui diskusi, media sosial, dan pengaruh tokoh-tokoh agama di dunia maya. Proses rekrutmen kelompok radikal sering kali dimulai dengan narasi yang mengarahkan mahasiswa untuk mempertanyakan nilai-nilai fundamental negara seperti Pancasila dan NKRI secara tidak objektif (Ningrum & Ediyono, 2022).

Sebagai upaya penanggulangan, perguruan tinggi perlu menerapkan berbagai langkah pencegahan, seperti memperkuat pendidikan karakter, rasa nasionalisme, toleransi, dan multikulturalisme. Kegiatan akademik maupun non-akademik yang menanamkan semangat kebhinekaan dan patriotisme harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kampus. Mata kuliah Pendidikan Agama dan Pancasila juga memegang peran penting dalam membentuk pola pikir yang moderat dan berimbang. Selain itu, melibatkan organisasi kemahasiswaan (ormawa) dalam program deradikalisasi sangat krusial, mengingat kelompok ini sering dijadikan sasaran infiltrasi oleh paham ekstrem (Ningrum & Ediyono, 2022).

Namun, tantangan utama dalam menangkal radikalisme adalah menciptakan kesadaran kritis mahasiswa tanpa membatasi kebebasan akademik. Kampus harus menjadi ruang inklusif yang bebas dari pemaksaan ideologi, tetapi tetap mendorong pemikiran kritis dan semangat kebangsaan. Menurut pandangan kami, pendekatan **soft power** seperti yang diusulkan BNPT melalui kontra-radikalisasi dan deradikalisasi berbasis nilai-nilai Pancasila merupakan strategi yang efektif, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, kolaborasi lintas sektor, serta kewaspadaan dosen dan civitas akademika dalam mendeteksi gejala ekstremisme sedini mungkin.

6. Kolaborasi Multisektor dalam Pencegahan Radikalisme

Radikalisme merupakan ancaman ideologis yang bersifat multidimensional, sehingga upaya pencegahannya tidak bisa hanya dibebankan pada satu sektor tertentu. Karena sifatnya yang kompleks dan berakar pada persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, dan ideologis, maka pendekatan yang diperlukan pun harus menyentuh seluruh lini masyarakat melalui kolaborasi multisektor. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi pilar penting dalam membangun ketahanan ideologis masyarakat dan mencegah berkembangnya paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila (Mahendra *et al.*, 2023). Dalam kerangka inilah pendidikan Pancasila yang terukur menjadi titik temu dari berbagai sektor untuk secara aktif terlibat dalam pencegahan radikalisme secara sistemik dan berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah ancaman terorisme adalah melalui program deradikalisasi. Di Indonesia, deradikalisasi dilakukan melalui tahapan pengenalan, rehabilitasi, re-edukasi, dan resosialisasi individu atau kelompok warga yang terpapar paham dan aktivitas radikal, dengan memprioritaskan pemberdayaan, hak asasi manusia, hukum, dan kesetaraan. Proses deradikalisasi dapat dilakukan melalui cara konvensional dan teknologi data serta diikuti dengan koordinasi pihak-pihak terkait seperti TNI, Polri, BIN, dan lainnya. Pihak-pihak terkait dapat melakukan pemblokiran terhadap akun sosial media ataupun situs website, serta tindakan responsif kepada pihak yang berupaya menyebarkan pemikiran radikalisme, serta teroris sebagai wujud kampanye tegas pemerintah melawan aksi terorisme di ranah dunia maya (Mahendra *et al.*, 2023).

Kolaborasi multisektor telah diterapkan oleh beberapa forum dan institusi di Indonesia, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sinergi ini menjadi dasar bagi pelaksanaan program-program pencegahan seperti pelatihan ideologi kebangsaan, kerja sama lintas instansi di sektor maritim, dan edukasi di ruang publik (Ladjima *et al.*, 2023). Langkah ini memperluas spektrum intervensi dari sekadar penegakan hukum menjadi pembinaan dan edukasi preventif.

Di level nasional, BNPT sebagai institusi yang memiliki mandat dalam pencegahan terorisme dan radikalisme telah membangun pendekatan kolaboratif melalui model pentahelix. Model pentahelix melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Implementasi nyata dari pendekatan ini dapat dilihat melalui kerja sama BNPT dengan instansi terkait seperti BAKAMLA (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang difokuskan pada sektor kemaritiman. BAKAMLA mempunyai tugas untuk mengawasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam rangka menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, BNPT bekerjasama dengan BAKAMLA untuk mencegah ancaman terorisme, termasuk serangan terorisme di wilayah perbatasan laut dan penanganan FTF (*Foreign Terrorist Fighter*) yang memasuki wilayah Indonesia. Adapun kerjasama BNPT dengan KKP bertujuan untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme melalui sinergitas kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam kerjasama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi tentang dugaan atau indikasi terorisme di sektor kelautan dan perikanan, peningkatan keterampilan usaha perikanan dalam rangka deradikalisasi kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan BNPT dan KKP (Mahendra *et al.*, 2023). Bentuk sinergi ini menegaskan bahwa sektor-sektor yang secara tradisional dianggap jauh dari isu ideologis justru bisa menjadi titik rawan penyebaran paham radikal jika tidak dilibatkan dalam upaya pencegahan.

Di tingkat daerah, peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi sangat vital. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), khususnya pada daerah Maluku Utara, menunjukkan bagaimana kerja lintas sektor dapat diperluas sampai ke tingkat lokal. FKPT menggandeng institusi pendidikan, tokoh agama, pemuda, hingga ibu rumah tangga dalam merancang program-program yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, kebhinekaan, dan moderasi. Edukasi kepada guru dan siswa melalui pelatihan penguatan moderasi beragama, pelibatan perempuan dalam peran preventif di lingkungan keluarga, serta penyelenggaraan festival budaya bertema kebangsaan merupakan bentuk pendekatan yang menyentuh langsung akar sosial masyarakat. Pelibatan perempuan secara khusus diarahkan sebagai strategi jangka panjang mengingat peran ibu dalam membentuk karakter ideologis anak di rumah sangat strategis (Ladjima *et al.*, 2023).

Adapun pendekatan kolaboratif yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), khususnya untuk daerah Kabupaten Tasikmalaya, memperkaya model pencegahan radikalisme berbasis komunitas. FKUB berperan aktif melalui strategi yang mencakup pendekatan lunak (*soft approach*) dan pendekatan keras (*hard approach*). *Soft approach* dilakukan melalui program seperti ceramah kebangsaan, dialog lintas agama, saung rukun, sosialisasi toleransi di sekolah-sekolah, serta pembentukan RT dan RW Rukun yang menyasar lapisan masyarakat paling bawah. Sementara *hard approach* dilaksanakan

melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi gangguan kerukunan dan pelanggaran kebebasan beragama. FKUB juga menyusun peta daerah rawan konflik berbasis observasi lapangan dan wawancara dengan mantan simpatisan kelompok radikal. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam pemetaan potensi radikalisme berbasis geografis dan sosial (Jajuri & Rahmat, 2021).

7. Rekomendasi Strategis

Strategi dalam mencegah radikalisme di berbagai kalangan masyarakat di era ini dapat dilakukan dengan optimalisasi penguatan pendidikan pancasila. Pendidikan merupakan suatu proses yang menjadikan manusia lebih berfikir dewasa tentang masa depannya (Kurniawansyah *et al.*, 2023). Pancasila dijadikan dasar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki peran besar dalam pencegahan radikalisme. Pencegahan radikalisme dapat dimulai dari lingkup sekolah hingga perguruan tinggi.

Dalam lingkup sekolah, pendidikan pancasila harus memberikan pengetahuan terkait pentingnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan kesadaran sosial, sehingga dari sini dapat timbul sikap toleran, keadilan dan persatuan. Siswa harus dibiasakan untuk berpikir secara kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi ekstrem serta lebih ditekankan pada pendidikan karakter yang berbasis pancasila. Melalui kurikulum merdeka, sekolah memperoleh fleksibilitas untuk menyesuaikan materi pendidikan dengan lingkungan serta kebutuhan siswa. Hal ini mendukung integrasi pendidikan pancasila dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang relevan. Kurikulum merdeka berfokus pada materi yang bersifat esensial dan menekankan pengembangan karakter, dimana siswa dilibatkan dalam pendidikan yang partisipatif seperti adanya kegiatan bakti sosial atau meninjau permasalahan lokal di lingkungan sosial sehingga dapat melihat secara langsung penerapan prinsip pancasila dalam kehidupan sehari - hari. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang pancasila, akan tetapi mampu menumbuhkan kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, pembelajaran harus dibuat se inovatif mungkin, salah satunya dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis diskusi kelompok dan permainan edukatif. Diskusi berbasis kelompok membantu siswa dalam berpikir kritis sekaligus meningkatkan keterampilan sosialnya, dimana diskusi dapat menjadi wadah berbagi pendapat dan pengalaman siswa tentang penerapan nilai - nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, pendidikan pancasila dapat dilakukan dengan melakukan simulasi atau *role-playing*, yang memungkinkan siswa mengalami suatu situasi sosial secara langsung. Sebagai contoh, simulasi situasi ketika terjadi konflik atau perbedaan pendapat, dimana keduanya harus disikapi dengan sikap toleransi dan menghargai perbedaan serta harus diselesaikan dengan cara damai berdasarkan prinsip pancasila. Dengan paparan simulasi di awal, siswa dapat memiliki acuan dalam bersikap/bertindak apabila dihadapkan dengan situasi yang serupa di kehidupan sehari - hari. Peran guru juga tidak luput dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai serta menjadi fasilitator yang membantu siswa untuk memahami makna dari setiap nilai yang diajarkan. Lingkungan pendidikan sebaiknya dibuat kondusif dan yang terpenting siswa merasa aman dan nyaman untuk berdiskusi atau mencurahkan pendapat dengan fasilitator, terutama terkait isu-isu radikalisasi dan toleransi (Auzi *et al.*, 2024).

Selain melalui pendidikan formal, faktor - faktor eksternal seperti lingkungan sosial dapat berdampak signifikan terhadap pemahaman tentang toleransi. Terutama di era global dimana akses internet dan media sosial sangat mudah untuk diakses oleh siapapun. Kemudahan pencarian informasi di ruang siber dapat memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif berupa penyebaran narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini

dapat memberikan ancaman terhadap keamanan hingga pertahanan nasional apabila media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan konten radikalisme. Media sosial sangat efektif untuk penyebaran pemahaman radikalisme karena mampu membuat orang merasa terlibat langsung dengan suatu peristiwa serta mampu meningkatkan reaksi emosional seseorang sehingga akhirnya terlibat dan mendukung gerakan radikal. Upaya strategis pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital RI dalam menanggulangi hal ini yakni melakukan pemblokiran terhadap situs - situs yang dinilai melanggar (Akbari *et al.*, 2025). Namun, terciptanya ketertiban dan keamanan tidak hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab terbesar adalah masyarakat dan seluruh pengguna internet/sosial media. Untuk menghindari dan meminimalisir, masyarakat harus dibekali dengan nilai - nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman radikalisme. Pendidikan Pancasila sangat mungkin diintegrasikan melalui media sosial, dimana nilai - nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan menghadirkan konten edukatif yang disertai dengan dasar yang kuat serta tulisan dapat dipertanggung jawabkan. Pendekatan ini dapat menjadi strategi efektif untuk tetap memaparkan nilai - nilai Pancasila kepada masyarakat dengan memanfaatkan *platform* yang telah menjadi bagian keseharian dari masyarakat sehingga mencegah terjadinya radikalisme (Arifin & Handayani, 2021).

KESIMPULAN | CONCLUSION

Pancasila berperan sentral sebagai fondasi ideologi untuk mencegah radikalisme dengan menanamkan prinsip kemanusiaan, persatuan, dan toleransi. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan sejak dini dengan metode interaktif seperti permainan peran, diskusi kelompok, dan integrasi dalam kurikulum dapat membentuk karakter generasi muda yang kritis, inklusif, dan berketahanan ideologis. Pendidikan multikultural dan pemanfaatan media digital yang kreatif juga diperlukan untuk memerangi narasi radikal di ruang siber. Di perguruan tinggi, penguatan moderasi beragama, kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan, serta penyeimbangan kebebasan akademik dengan kesadaran kritis menjadi kunci. Kolaborasi multisektor (pemerintah, akademisi, masyarakat, media) melalui program deradikalisasi, pemantauan digital, dan edukasi kebangsaan memperkuat ketahanan nasional. Rekomendasi strategis seperti kurikulum berbasis Pancasila yang fleksibel dan konten edukatif di media sosial menjadi langkah konkret untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara holistik. Upaya ini menegaskan bahwa pencegahan radikalisme memerlukan pendekatan sistematis, berkelanjutan, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

REFERENSI | REFERENCE

- Akbari, A. A., Basir, S., & Syauqillah, M. (2025). Penanggulangan Konten Radikalisme di Dunia Maya Oleh POLRI. *Syntax Literature : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(3), 2478–2490.
- Andriani, F., & Najicha, F. U. (2022). Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Benteng Radikalisme Di Perguruan Tinggi. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian*, 1–10.
- Arifin, Z., & Handayani, E. P. (2021). Melawan Radikalisme dengan Menyamakan Aras Membumikan Pancasila di Masa Pandemi Lewat Media Online. *Jurnal Pancasila*, 2(1), 30–45.
- Auzi, C., Saragi, D., Ndona, Y., & Negeri, U. (2024). *Peran Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Radikalisme pada Kalangan Siswa Sekolah Dasar*. 721–729.
- Deti, S., & Dewi, D. A. (2021). Pengimplementasian Nilai Nilai Pancasila Untuk Mencegahnya Radikalisme Di Indonesia. *Jurnal Edumaspul*, 5(1), 557–564.

- Dinarti, N. S., & Dewi, D. A. (2022). Pentingnya Peran Pendidikan Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Untuk Mencegah Paham Radikalisme. *Jurnal kewarganegaraan*, 6(1), 1968-1974.
- Hastangka, & Ma'ruf, M. (2021). Metode Pancasila dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), 115–129.
- Iqbal, M., Suci, R.A., Alya, M., Amanda, S., Aura, S., Yella, M.D ... Hafiza, R.Z. (2024). Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Kampus : Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Medan. *Guruku: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 89–102.
- Jajuri, R. A., & Rahmat, R. (2021). Analisis Kebijakan Counter-Radikalisme Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2), 160-168.
- Kartika, I. M., & Mahendra, P. R. A. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 3144–3151.
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Mustari, M. (2023). Peran Guru PPKn dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SMA Muhammadiyah Sumbawa. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(2), 1175-1179.
- Kurniawati, R.D., Nuraeni, Y., Zuraidah. (2024). Terorisme, Radikalisme, dan Khilafah di Negara Demokrasi Pancasila. *Journal Presumption of Law*, 6(2). 222-233.
- Kusuma, A. F. P., Aditya, D., Aziz, F. F., Samadi, N. F., & Antoni, H. (2024). Implementasi Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Di Kalangan Masyarakat Indonesia. *Cendikia : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(12), 685–692.
- Ladjima, F., Lating, A., & Usman, S. (2023). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora (JSSH)*, 3(1), 59-68.
- Mahendra, R., Widodo, P., Saragih, H. J. R., Suwarno, P., & Yulianto, B. A. (2023). Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme dan Terorisme oleh BNPT di Wilayah Kemaritiman Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 204-212.
- Ningrum, R. S., & Ediyono, S. (2022). Pengaruh Gerakan Radikalisme pada Perilaku Mahasiswa. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Pakpahan, R., Siregar, F. A., & Hidayat, D. (2021). Pendidikan Pancasila Sebagai Strategi Pencegahan Radikalisme di Perguruan Tinggi: Studi kasus STT Bethel Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 45-60.
- Pardi, I.W. (2025). Memperkuat Nilai-Nilai Pancasila pada Generasi Muda sebagai Upaya untuk Menangkal Radikalisme dan Depancasilaisasi. *Jurnal Sangkala*, 4(2).
- Purnawanto, A. T. (2023). Pendidikan Karakter melalui Internalisasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pedagogy*, 16(2), 103-115.
- Sari, A. M., Hamida, A., Mariana, R., Azam, M. K., Bakri, B., & Efendi, Y. (2023). Optimalisasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Talang Lindung. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*, 3(1), 44-56.
- Satria, B.M.W., Alif, M.N.F., Cahya, R.B.M.P., & Puti, A.W.S. (2023). Upaya Pencegahan Potensi Radikalisme dengan Penanaman Ideologi Pancasila di Lingkup Sekolah. *Journal of Education Research*, 4(1).
- Widiarsa. (2019). Kajian Pustaka (Literature review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka. *Media Informasi*, 28(1), 111–124.